

TAJUK RENCANA

’Rama Tambak’ Tangerang

DALAM dunia wayang serial Ramayana, ada lakon Rama Tambak yang menceritakan Prabu Rama sebagai Raja Alengka membuat tambak untuk menghadang pasukan musuh yang akan menyerang Negeri Alengka. Tambak tersebut berupa pasukan kera yang jumlahnya mencapai ratusan ribu ekor. Dalam lakon wayang, juga ada lakon *Rebut Kikis Tunggarana*, sedangkan dalam budaya Jawa ada pepatah *pager piring*.

Dalam dunia nyata saat ini, baru saja ditemukan adanya pagar laut sepanjang 30,6 kilometer di kawasan perairan laut Tangerang Banten. Namun setelah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan peninjauan dan pemeriksaan, ditemukan data dan fakta bahwa di lokasi tersebut telah diterbitkan 263 bidang SHGB yang terdiri 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut.

Terkait temuan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyatakan, penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang Banten tersebut berstatus cacat prosedur dan material. Bahkan Nusron menegaskan, perairan pantai utara Tangerang yang ‘dipagari’ bambu tersebut berada di luar garis pantai yang tidak boleh menjadi privat properti. Kawasan tersebut tidak bisa disertifikasi, sehingga SHGB dan SHM di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan. Disebutkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum lima tahun, Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan, sehingga batal demi hukum.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Tange-

rang, mengungkapkan, tahapan penyelidikan dalam kasus pagar ini dilakukan secara profesional dan transparan. Hingga saat ini, pihaknya telah memanggil dan menerima pemeriksaan kepada dua orang nelayan yang sebelumnya mengaku/klaim terkait pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut.

KKP akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang tersebut. Hal itu dilakukan, sebagai bukti kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi masyarakat nelayan yang tengah dilanda kesulitan dalam mencari ikan di laut.

Dalam rapat kerja bersama DPR RI, Kamis (13/1), Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, target penyelesaian persoalan pagar laut di perairan Tangerang itu bisa terselesaikan dalam satu minggu ke depan. Penyelesaian dimaksud, sesuai dengan kewenangan KKP adalah secara administrasi. Hal itu merupakan komitmen KKP kepada Komisi IV DPR RI dan publik.

Trenggono memastikan investigasi terhadap pagar laut di perairan Tangerang akan terus dilanjutkan KKP. Selain investigasi, juga konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah pagar laut tampaknya masih akan berkepanjangan. Apalagi media sosial telah menghubungkan masalah pagar laut dengan tambak di Sidoarjo Jawa Timur, bahkan ada yang menghubungkan dengan pembangunan IKN. Akan kah Menteri ATR/Kepala BPN dan Menteri KKP benar-benar akan menyelesaikan masalah tersebut secara transparan dan terang benderang? Atau kan hanya akan seperti lakon Rama Tambak dalam dunia wayang? □ - f

Komunikasi Strategis Pengentasan Kemiskinan

TOPIK, isu dan kelembagaan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di hampir setiap periode pemerintahan selalu menjadi fokus dan lokus pembangunan. Dari satu periode ke periode yang lain, ia bagaikan gunung es dan bola salju yang terlihat ringkih namun sulit untuk dituntaskan. Pada dokumen Asta Cita Presiden Prabowo, kemiskinan ditargetkan turun hingga 0% pada Indonesia 2045. Saat ini level kemiskinan di Indonesia per September 2024 ada pada posisi 8,57%. Bagaimana model strategi komunikasi pemerintah mendorong akselerasi pengentasan kemiskinan yang melibatkan aneka *actor-stakeholders* di semua strata?

Studi dan kajian tentang penurunan kemiskinan sangat banyak, baik di aras global, nasional dan lokal. Di Indonesia, misalnya, lembaga yang terus merilis tingkat kemiskinan per waktu adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka selalu menyajikan hasil studinya per tiga-enam bulanan untuk masing-masing provinsi dan kabupaten serta nasional. BPS mencatat di DIY di September 2024, persentasi kemiskinannya ada pada posisi 10,40 persen atau turun 0,43 persen poin dibandingkan Maret 2024. Secara absolut, terdapat 430,47 ribu penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,11 persen, sedang di pedesaan sebesar 11,31 persen.

Artinya, angka-angka di atas menegaskan ada gap yang cukup signifikan antara visi Asta Cita yang 0% level kemiskinan kita berbanding dengan 8,57 % di aras nasional dan 10,11 % di aras lokal DIY. Jika 0% dicapai pada 2045, maka pertanyaan logisnya berapa persentase per lima tahun yang akan diturunkan? Berapa target riil dari periode kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika kita merujuk pada target RPJMN adalah 6,5% pada 2029. Sedangkan selama 10 tahun Presiden Jokowi, penurunan kemiskinan terhitung sangat lambat. Seharusnya target 6,5% telah tercapai pada periode Jokowi. Karena tidak tercapai, periode Presiden Prabowo harus mengubah pola dan strateginya. Jika melihat hampir 100 hari

William E Aipipidely

pemerintahannya, caranya amat berbeda dengan presiden sebelumnya.

Realitas Sistem

Namun, realitas angka-angka ini dapat dibaca sebagai sebagai potret sistem. Komunikasi strategis yang kuat tak dapat dilepaskan dari cara pikir sistem. Aktor, medium, publik, cara, dan strategi merupakan elemen yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya, komunikasi dalam perspektif sistem mempercayai bahwa komunikasi yang sukses tidak



KR-JOKO SANTOSO

terjadi begitu saja komunikasi yang sukses merupakan hasil dari penelitian yang matang, perencanaan yang cermat, implementasi dan evaluasi yang komprehensif, kata Cutlip, Center, Broom, (2006 dalam Effective public relations). Maka, perlambatan pengentasan kemiskinan juga harus dibaca sebagai ada soal yang krusial dalam melihat kemiskinan dalam terma yang sistemik dan komprehensif. Kebijakan politik yang menghambat pada oligarki dan syawat kuasa selalu dicari sebagai alasan pembenarannya. Jika sistem itu timpang, ia akan keluar dalam rupa korupsi yang marajalela, kebijakan yang dibuat untuk kuasa tanpa etik, data penduduk tidak terintegrasi, dan warga negara yang makin susah. Jadi, angka-angka

itu menjawabnya, bahwa ada soal dalam mandate mensejahterahkan warga negara.

BDT, Koordinasi dan Enggagement

Analisis situasi adalah satu proses untuk melihat problem dalam menyusun strategi komunikasi. Analisis situasi ini memaksa untuk pergi ke data yang akurat, pasti dan terintegrasi. Basis Data Terpilih (BDT) adalah fakta yang tak pernah tuntas diurus oleh badan perencanaan di semua level pemerintahan. Ini terjadi karena lemahnya koordinasi antar aktor yang terlibat dalam urusan pengentasan

kemiskinan. Brasil dan Cina adalah contoh dua negara yang berhasil keluar mengentaskan kemiskinan warganya. Presiden Prabowo dan kepala BP Taskin, Budiman Sujatmiko mengatakan, mereka mau belajar dari Cina dan Brasil pada dua hal: data tunggal terintegrasi dan koordinasi yang solid antar-lembaga pemerintah, privat sektor, Media dan CSOs. Seruan presiden untuk merampungkan data tunggal adalah bukti kesadaran sistem dari pemimpin yang mau melayani warganya. Keterlibatan semua aktor harus menjadi narasi besar agar kesejahteraan jadi etalase sistemik! (*)-d

*)William E Aipipidely, Direktur Eksekutif MANNADOA COMMUNICATION CONSULTING & Konsultan Manajemen Program Danaindonesiana Kemendikbudristek RI.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkrk23@yahoo.com, iklanlkrk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Makanan Bergizi Gratis dan Indonesia Emas

MENURUT Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023, status gizi balita di Indonesia masih menghadapi masalah serius. Prevalensi stunting tercatat sebesar 21,5%, sementara angka *wasting* (kurus) mencapai 7,4%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masih banyak balita kekurangan gizi yang cukup dan seimbang, yang dapat berdampak pada perkembangan fisik dan mental mereka. Kondisi ini memperburuk ketimpangan dalam kualitas kesehatan anak-anak, yang berpotensi menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dengan optimal, baik dalam hal fisik maupun kognitif.

Cekucupan gizi menjadi kunci utama untuk mewujudkan generasi yang sehat dan produktif. Gizi yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan tubuh yang optimal, tetapi juga perkembangan otak yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan anak-anak di masa depan. Jika masalah gizi tidak segera ditangani, akan kian sulit bagi Indonesia untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di dunia global. Karena itu, upaya penanggulangan masalah gizi, seperti dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program terbaru yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi dimulai pada Senin (06/01/2025) sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi tanpa biaya kepada sekitar 600.000 anak sekolah yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program ini, anak-anak sekolah dapat memperoleh gizi yang memadai untuk mendukung perkembangan fisik dan akademik mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi terbaik mere-

Triningsih

ka. Peluncuran program MBG juga merupakan bagian dari upaya pemerintahan untuk mengurangi prevalensi stunting dan gizi buruk, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, kuat, dan produktif, yang akan menjadi aset penting dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Program ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal.

Logika tanpa Logistik

Logika tanpa logistik dapat diibaratkan seperti sebuah rencana cemerlang yang terhambat dalam pelaksanaannya karena kurangnya dukungan yang tepat. Dalam konteks gizi dan makanan, meskipun kita mengetahui betapa pentingnya pola makan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh, tanpa logistik yang baik, informasi tersebut akan sulit diterapkan. Makanan bergizi harus dapat diakses dan tersedia dengan mudah bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Tanpa sistem distribusi yang efisien, program pemberian gizi yang sudah direncanakan dengan matang bisa gagal untuk mencapai sasaran, seperti halnya ide yang brilian namun tidak terlaksana dengannya baik. Sebaliknya, logistik yang baik akan memastikan logika dan rencana terkait gizi dapat dijalankan

dengan efektif. Misalnya, program penyediaan makanan bergizi di sekolah atau bagi masyarakat yang kurang mampu, akan berjalan lancar jika didukung dengan distribusi yang tepat waktu, sumber daya yang cukup, serta pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan gizi yang sesuai. Tanpa logistik yang memadai, meskipun logika dan tujuan program sudah jelas, kenyataannya akan sulit tercapai. Karena itu, dalam konteks gizi dan makanan, logika dan logistik harus bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tanggal 25 Januari merupakan Hari Gizi Nasional, sebuah kesempatan yang tepat untuk merenung bahwa gizi merupakan dasar penting bagi kesehatan generasi mendatang dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045. Diharapkan dengan pemenuhan gizi yang baik, akan lahir generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Selamat Hari Gizi Nasional. (*)-d

*)Triningsih SIP, Pustakawan Muda UIN Raden Mas Said Surakarta & Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pojok KR

Terjadi retakan, Plengkung Gading Kraton Yogyakarta akan ditata ulang.
- Perlu tata ulang.

Presiden perintahkan aparat cepat tangani dampak banjir di Pekalongan.
- Tetap waspada!

Menteri KKP akan selesaikan masalah pagar laut Tangerang dalam satu minggu.
- Artinya tujuh hari?

Berabe